

Judul : Prihatin, kebijakan dagang kita banyak digugat di WTO
Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Prihatin, Kebijakan Dagang Kita Banyak Digugat Di WTO



Syaifullah Tamliha

BADAN Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) prihatin mengetahui banyak kebijakan perdagangan Indonesia digugat di WTO. Karena itu, BKSAP mendorong pemerintah menjaga kepentingan perdagangan Indonesia di forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

Wakil Ketua BKSAP Syaifullah Tamliha menyampaikan, sejak World Trade Organization (WTO) berdiri pada tahun 1995, Indonesia telah terlibat dalam 36 kasus sengketa di forum DSB atau badan penyelesaian sengketa di WTO.

Sengketa itu terdiri dari 10 kasus sebagai pengadu (complainants), 13 kasus sebagai teradu (respondent), dan 13 kasus sebagai pihak ketiga (third party). Saat ini Indonesia termasuk negara paling sering bersengketa di forum DSB. Indonesia menempati posisi kedua setelah Uni Eropa, baru kemudian AS dan China.

“Kebijakan perdagangan Indonesia, khususnya mengenai kebijakan yang menyangkut tata cara impor sering digugat di DSB WTO. Baru-baru ini Brazil menggugat soal impor daging,”

katanya setiba di Tanah Air usai menghadiri acara WTO di Jenewa, Swiss, kemarin.

Syaifullah berharap pemerintah tidak menyepelekan kasus sengketa perdagangan di forum DSB. Pemerintah diharapkan mampu menjaga kepentingan perdagangan Indonesia di forum DSB agar tidak dirugikan negara mitra.

Menurutnya, apabila posisi Indonesia sebagai *complainant* di forum DSB, maka menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengupayakan agar kebijakan-kebijakan perdagangan negara mitra tidak menghambat akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia.

Sedangkan jika sebagai responden, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban di DSB WTO untuk meyakinkan seluruh anggota bahwa kebijakan Indonesia yang digugat tidak bertentangan dengan aturan-aturan WTO.

“Ke depan jumlah sengketa yang akan dihadapi oleh Indonesia di DSB ini akan dapat bertambah jumlahnya, mengingat masih banyak berbagai kebijakan perdagangan Indonesia yang menjadi sasaran kritikan dari berbagai negara mitra di berbagai Badan Subsider WTO, yang mengawasi pelaksanaan berbagai Persetujuan WTO oleh negara anggota,” bebernya.

Syaifullah mengingatkan, kemungkinan Indonesia kalah dalam setiap perkara penyelesaian sengketa di DSB sangat besar. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa proses beracara di DSB sangatlah menuntut tersedianya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. ■ QAR